

ANALISIS KEMISKINAN DI JAWA TENGAH

Dicky Wahyudi, Tri Wahyu Rejekingsih¹

Jurusan IESP Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

Percentage of poor people in Indonesia are concentrated in Java Island by more than 50%. Central Java was the province of a percentage of the highest poverty rates in Java in recent years. Persistent higher average absolut poverty rate in Central Java at the level 20.02% that is including in Hard Core Poverty category ($> 10\%$). Then almost of 50% regencies / cities in Central Java still has a absolut poverty rate $> 20\%$. This study aims to analyze poverty and to know what variables has affected poverty rate in Central Java. The method of analysis used in this study are panel data regression with fixed effect model. This research's model using dummy regions that function to discern the different character of poverty rate in each regencies / cities in Central Java, therefore the fixed effect model is also called least square dummy variable (LSDV). The results showed that health, education, government expenditure, unemployment has significant impact on poverty rate in Central Java. Meanwhile, economic growth has not significant on poverty rate. Increasing government expenditure especially in the functions of health, education, public utilities, and general social protection will impact the lower poverty rate. While the government health care for the poor is essential to increase their welfare. Education can dismiss a person from backwardness and poverty. Unemployment effected to lower welfare because the unemployed do not get revenue and closer to the poverty, therefore creating more job and employment opportunities vastly needed to reduce poverty.

Keywords: Poverty Rate, Fixed Effect Model, Panel Data

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah multi dimensi yang dihadapi oleh negara-negara di dunia. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum (Kuncoro, 1997). Persentase jumlah penduduk miskin di Indonesia terkonsentrasi dipulau Jawa sebesar lebih dari 50 %, dimana provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang persentase tingkat kemiskinan absolutnya paling tinggi se-Jawa dalam beberapa tahun belakangan ini. Masih tingginya rata-rata tingkat kemiskinan absolut di Jawa Tengah yang berada pada level 20,02% dimana hal tersebut masih tergolong *Hard Core Poverty* ($>10\%$) dalam artian tingkat kemiskinan masih berada pada level yang tinggi. Kemudian hampir sekitar 50% kabupaten / kota di Jawa Tengah masih memiliki tingkat kemiskinan absolut $> 20\%$. Dalam kurun waktu tahun 2005-2009 tingkat kemiskinan absolut di Jawa Tengah telah mengalami penurunan tetapi masih berada dalam kategori tinggi sebesar 17,72% ditahun 2009 dan memiliki rata-rata tingkat kemiskinan absolut 5 tahun sebesar 20,02%.

Adanya target tingkat kemiskinan absolut tahun 2013 yang dicanangkan Bappeda sebesar 13,27% dan kesepakatan MDG's pada tahun 2015 dimana tingkat kemiskinan absolut harus berada pada level dibawah 10%. Guna pencapaian target tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah haruslah berusaha lebih keras. Analisis lebih mendalam mengenai masalah kemiskinan di Jawa Tengah sangat diperlukan guna mencari faktor penyebab mengenai masalah kemiskinan di Jawa Tengah. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menganalisis mengenai kemiskinan yang terjadi di Jawa Tengah.

Penelitian ini bertujuan menganalisis kemiskinan di Jawa Tengah dan melihat bagaimana berpengaruh kesehatan, pendidikan, pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.

¹ Penulis penanggung jawab

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Pengertian mengenai arti dari kemiskinan sangatlah beragam, keberagaman dalam definisi kemiskinan dikarenakan masalah tersebut telah merambat pada level multidimensional, artinya kemiskinan berkaitan satu sama lain dengan berbagai macam dimensi kebutuhan manusia. Ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum yang sesuai dengan tingkat kelayakan hidup dapat dikatakan sebagai kemiskinan (Todaro, 2006).

Pendapat lainnya dikemukakan Sharp, et al dalam Mudrajat Kuncoro (2006) mengidentifikasi penyebab kemiskinan yang dipandang dari sisi ekonomi. a) Secara mikro kemiskinan muncul karena adanya ketidakseimbangan pada kepemilikan sumberdaya oleh masing-masing individu yang menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan; b) Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia satu sama lain; c) Kemiskinan muncul akibat perbedaan masing-masing individu dalam mengakses permodalan. Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*Vicious circle of poverty*). Adanya keterbelakangan, ketidak sempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas akan mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan. Oleh karena itu, setiap usaha untuk mengurangi kemiskinan seharusnya diarahkan untuk memotong lingkaran dan perangkat kemiskinan ini (Kuncoro, 2006).

Pengaruh Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan

Pendidikan memainkan peran kunci dalam membentuk kemampuan sebuah Negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro, 2006). Mankiew (2000) menyebutkan, seseorang yang berpendidikan tinggi dapat menghasilkan gagasan baru tentang bagaimana pilihan terbaik untuk memproduksi barang dan jasa. Jika gagasan ini dapat diterima oleh penduduk luas, maka semua orang dapat menggunakannya sehingga gagasan tersebut dapat dikatakan sebagai manfaat eksternal dari pendidikan. Dalam hal ini, tingkat pengembalian pendidikan yang diterima oleh penduduk lebih besar dibandingkan dengan tingkat pengembalian yang diterima oleh individu.

Jika dikaitkan dengan teori lingkaran setan kemiskinan versi Nurse menggambarkan bahwa keterbelakangan dan ketertinggalan merupakan suatu hal yang harus diputus mata rantainya guna mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi. Keterbelakangan dan ketertinggalan dapat diatasi dengan adanya pendidikan yang diselenggarakan oleh negara untuk warga negaranya guna mendapatkan ilmu pengetahuan yang dapat mengurangi tingkat keterbelakangan dan ketertinggalan suatu daerah. Pendidikan juga merupakan *Human Capital*, semakin tinggi pendidikan yang ditamatkan oleh seseorang maka akan meningkatkan produktivitas orang tersebut karena pengetahuan dan ilmu yang diperoleh lebih banyak. Peningkatan produktivitas ini akan meningkatkan pendapatan baik pendapatan individu tersebut, maupun pendapatan nasional. Peningkatan pendapatan individu akan meningkatkan kemampuan konsumsi mereka, sehingga dapat mengangkat kehidupan mereka dari kemiskinan.

H_1 : Pendidikan berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemiskinan.

Pengaruh Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan

Akses terhadap pelayanan kesehatan merupakan tanggungjawab yang harus diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakatnya. Kesehatan merupakan standar hidup minimum yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat. Kesehatan masyarakat yang cenderung baik akan berdampak pada produktivitas dan etos kerja yang meningkat pula, alhasil pendapatan yang dihasilkan meningkat seiring dengan perbaikan kesehatan di masyarakat. Pendapatan baik secara individu maupun agregat akan bertambah. Pendapatan yang meningkat akan mengangkat derajat seseorang untuk keluar dari kemiskinan.

Lincolin (1999) menjelaskan intervensi untuk memperbaiki kesehatan dari pemerintah juga merupakan suatu alat kebijakan penting untuk mengurangi kemiskinan. Sedangkan Nurse dalam teori lingkaran setan kemiskinan juga mengemukakan produktivitas yang rendah sebagai faktor yang menyebabkan kemiskinan. Produktivitas yang rendah bisa diakibatkan oleh tingkat kesehatan

yang rendah. Kesehatan yang rendah akan mengakibatkan etos kerja menurun dan produktivitas seseorang menjadi rendah. Produktivitas yang rendah akan berdampak pada pendapatan yang menurun dan bisa membawa seseorang menjadi rentan terhadap kemiskinan.

H₂: Kesehatan berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemiskinan.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan

Rashid Mehmood dan Sara Sadiq (2010) mengemukakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kemiskinan memiliki hubungan negatif jika pengeluaran tersebut adalah jalur pembangunan seperti pembangunan fasilitas sosial, barang publik, infrastruktur, biaya modal tambahan, kesehatan dan pendidikan. Samsubar Saleh (2002) juga menggunakan variabel pengeluaran pemerintah untuk investasi sumber daya manusia dan pengeluaran pemerintah untuk sumber daya fisik perkapita per propinsi sebagai faktor penentu tingkat kemiskinan.

Mekanisme transmisi investasi publik untuk mempengaruhi distribusi pendapatan dan kemiskinan. Dari sisi pengeluaran, penurunan kemiskinan dan redistribusi pendapatan dapat dilakukan dengan tiga instrumen alokasi anggaran pemerintah, yaitu (1) subsidi langsung atau subsidi individu yang ditargetkan pada rumah tangga berpendapatan rendah (2) subsidi harga, subsidi komoditi yang digunakan oleh rumah tangga terutama untuk kebutuhan pokok, dan (3) pengeluaran langsung pemerintah terhadap pelayanan publik dan infrastruktur, terutama pada sektor kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan, yang diutamakan untuk rumah tangga berpendapatan rendah. Hal ini sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Rasidin Sitepu dan Bonar Sinaga (2009) yang menggunakan pengeluaran pemerintah sebagai proksi investasi sumberdaya manusia yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia (Sitepu dan Sinaga 2009)

H₃: Pengeluaran Pemerintah berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemiskinan.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan

Menurut Sadono Sukirno (2000), laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil. Selanjutnya pembangunan ekonomi tidak semata-mata diukur berdasarkan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) secara keseluruhan, tetapi harus memperhatikan sejauh mana distribusi pendapatan telah menyebar ke lapisan masyarakat serta siapa yang telah menikmati hasil-hasilnya. Sehingga menurunnya PDRB suatu daerah berdampak pada kualitas dan pada konsumsi rumah tangga. Apabila tingkat pendapatan penduduk sangat terbatas, banyak rumah tangga miskin terpaksa merubah pola makanan pokoknya ke barang paling murah dengan jumlah barang yang berkurang.

Kuznet dalam Tambunan (2001), menyatakan bahwa pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, hal ini dikarenakan pada tahap awal proses pembangunan akan terjadi kecenderungan peningkatan kemiskinan dan ketika proses pembangunan tersebut telah mendekati tahap akhir pembangunan, kemiskinan berangsur-angsur menurun. Banyak penelitian yang membuktikan adanya keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan, antara lain penelitian yang dilakukan Wongdesmiwati (2009) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi tingkat kemiskinan yang akan ada. Semakin impresif pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada mereduksinya tingkat kemiskinan yang ada. Hal senada juga dikemukakan oleh Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2008). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan adanya hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk miskin.

H₄: Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemiskinan.

Pengaruh Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan

Menurut Sadono Sukirno (2004), efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kepada kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

Sedangkan menurut Tambunan (2001), pengangguran dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan dengan berbagai cara, antara lain: a) Jika rumah tangga memiliki batasan likuiditas yang berarti bahwa konsumsi saat ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, maka bencana pengangguran akan secara langsung mempengaruhi *income poverty rate* dengan *consumption poverty rate*. b) Jika rumah tangga tidak menghadapi batasan likuiditas yang berarti bahwa konsumsi saat ini tidak terlalu dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, maka peningkatan pengangguran akan menyebabkan peningkatan kemiskinan dalam jangka panjang, tetapi tidak terlalu berpengaruh dalam jangka pendek.

Sebagaimana teori lingkaran setan kemiskinan versi nurse yang menggambarkan rendahnya produktivitas sebagai salah satu sebab kemiskinan. Pengangguran bisa diartikan sebagai tingkat produktivitas seseorang yang rendah atau bisa juga tidak melakukan produktivitas sama sekali. Hal ini karena penganggur tidak memiliki suatu pekerjaan untuk menghasilkan upah ataupun gaji. Padahal sebagian besar rumah tangga bergantung dari gaji/ upah yang didapat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pengangguran ini lebih sering terjadi pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah sehingga mereka harus hidup di bawah garis kemiskinan. Faktor ini diekspektasikan akan menyebabkan hubungan yang signifikan dan berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Dengan kata lain semakin banyak pengangguran akan menyebabkan meningkatnya tingkat kemiskinan.

H₅: Pengangguran berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Data tingkat kemiskinan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tingkat kemiskinan kabupaten / kota pada masing-masing daerah di Provinsi Jawa Tengah yang dinyatakan dalam satuan persentase pada tahun 2007-2010. Variabel kesehatan pada penelitian ini diproses dari persentase desa / kelurahan yang melaksanakan imunisasi dasar *Universal Child Immunization* (UCI) menurut kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2010. Satuan yang digunakan pada variabel kesehatan ini adalah persentase. Data yang digunakan untuk variabel pendidikan diproses berasal dari persentase penduduk 10 tahun ke atas yang menamatkan pendidikan setingkat SD dan SMP untuk masing-masing kabupaten / kota di Jawa Tengah tahun 2007-2010. Satuan yang digunakan pada variabel pendidikan ini adalah persen. Data yang digunakan pada pengeluaran pemerintah diproses dari data APBD anggaran tahun 2007-2010 menurut fungsi khususnya pada bidang pendidikan, kesehatan, perumahan dan fasilitas umum, perlindungan sosial yang dijumlahkan menjadi satu. Satuan yang digunakan pada variabel pengeluaran pemerintah dinyatakan dalam satuan rupiah. Data pengangguran yang digunakan dalam penelitian ini adalah data jumlah pengangguran terbuka. Data jumlah pengangguran yang digunakan adalah penduduk Jawa Tengah berumur 15 tahun keatas yang termasuk pengangguran terbuka menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2010 dengan menggunakan satuan jiwa. Data pertumbuhan ekonomi yang digunakan menggunakan perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Data PDRB atas dasar harga konstan pada masing-masing kabupaten/kota bersumber dari BPS Jawa Tengah tahun 2007-2010. Satuan yang digunakan pada variabel pertumbuhan ekonomi dinyatakan dalam persentase.

Metode Analisis

Studi ini menggunakan analisis data panel (*pooled data*) sebagai alat pengolahan data dengan menggunakan software *evIEWS 6*. Analisis dengan menggunakan panel data adalah kombinasi antara *time-series data* dan *cross-section data* (Gujarati, 2009). Data yang digunakan adalah data *time series* selama 4 tahun terakhir yakni tahun 2007-2010 dan data *cross section* sebanyak 35 data yang mewakili kabupaten / kota di Jawa Tengah. Hasil dari kombinasi data *time series* dan *cross section* menghasilkan 140 observasi.

Penelitian ini menggunakan asumsi *fixed effect model* (FEM) sebagaimana pertimbangan pokok yang disampaikan oleh Judge bahwa unit *cross section* pada penelitian ini tidak diambil berdasarkan acak dan jumlah observasi yang dilakukan hanya 140 observasi. Sedangkan untuk *Random Effect Model* lebih sering digunakan untuk jumlah observasi yang banyak (diatas 1000

observasi). Asumsi dalam FEM yang digunakan dalam penelitian ini adalah asumsi koefisien slope konstan tetapi intersep bervariasi antar individu. Dalam artian intersep dari setiap individu diasumsikan memiliki perbedaan yang dikarenakan karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing individu dalam hal ini kabupaten / kota. Untuk melakukan asumsi tersebut diperlukan variabel dummy untuk memberikan nilai perbedaan pada masing-masing kabupaten / kota. Oleh sebab itu asumsi model FEM ini sering disebut sebagai *Least Square Dummy Variabel* (LSDV).

Dummy yang digunakan dalam penelitian ini adalah dummy wilayah (kabupaten / kota). Dari hasil tersebut nantinya akan diketahui perbedaan perkembangan tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Tengah selama 4 tahun periode penelitian (tahun 2007-2010). Penggunaan dummy variabel membutuhkan *benchmark* / wilayah acuan. *Benchmark* yang dipilih adalah Kota Semarang. Alasan pemilihan Kota Semarang sebagai *benchmark* karena Kota Semarang memiliki rata-rata tingkat kemiskinan kabupaten / kota terendah dibandingkan kabupaten / kota lainnya di Jawa Tengah. Model persamaan dengan LSDV sebagai berikut :

$$K_{it} = \beta_0 + \beta_1 H_{it} + \beta_2 E_{it} + \beta_3 GE_{it} + \beta_4 G_{it} + \beta_5 U_{it} + \alpha_1 D_1 + \alpha_2 D_2 + \alpha_3 D_3 + \alpha_4 D_4 + \alpha_5 D_5 + \alpha_6 D_6 + \alpha_7 D_7 + \alpha_8 D_8 + \alpha_9 D_9 + \alpha_{10} D_{10} + \alpha_{11} D_{11} + \alpha_{12} D_{12} + \alpha_{13} D_{13} + \alpha_{14} D_{14} + \alpha_{15} D_{15} + \alpha_{16} D_{16} + \alpha_{17} D_{17} + \alpha_{18} D_{18} + \alpha_{19} D_{19} + \alpha_{20} D_{20} + \alpha_{21} D_{21} + \alpha_{22} D_{22} + \alpha_{23} D_{23} + \alpha_{24} D_{24} + \alpha_{25} D_{25} + \alpha_{26} D_{26} + \alpha_{27} D_{27} + \alpha_{28} D_{28} + \alpha_{29} D_{29} + \alpha_{30} D_{30} + \alpha_{31} D_{31} + \alpha_{32} D_{32} + \alpha_{33} D_{33} + \alpha_{34} D_{34} + \varepsilon_{it}$$

dimana:

K	=	Tingkat kemiskinan per kabupaten / kota di Jawa Tengah
H	=	Kesehatan per kabupaten / kota di Jawa Tengah
E	=	Pendidikan per kabupaten / kota di Jawa Tengah
GE	=	Pengeluaran pemerintah per kabupaten / kota di Jawa Tengah
G	=	Pertumbuhan ekonomi per kabupaten / kota di Jawa Tengah
U	=	Pengangguran per kabupaten / kota di Jawa Tengah
D1	=	Dummy Kabupaten Cilacap
D2	=	Dummy Kabupaten Banyumas
D3	=	Dummy Kabupaten Purbalingga
D4	=	Dummy Kabupaten Banjarnegara
D5	=	Dummy Kabupaten Sragen
D6	=	Dummy Kabupaten Purworejo
D7	=	Dummy Kabupaten Wonosobo
D8	=	Dummy Kabupaten Magelang
D9	=	Dummy Kabupaten Boyolali
D10	=	Dummy Kabupaten Kebumen
D11	=	Dummy Kabupaten Sukoharjo
D12	=	Dummy Kabupaten Wonogiri
D13	=	Dummy Kabupaten Karanganyar
D14	=	Dummy Kabupaten Kudus
D15	=	Dummy Kabupaten Grobogan
D16	=	Dummy Kabupaten Blora
D17	=	Dummy Kabupaten Temanggung
D18	=	Dummy Kabupaten Pati
D19	=	Dummy Kabupaten Klaten
D20	=	Dummy Kabupaten Pemalang
D21	=	Dummy Kabupaten Demak
D22	=	Dummy Kabupaten Semarang
D23	=	Dummy Kabupaten Rembang
D24	=	Dummy Kabupaten Jepara
D25	=	Dummy Kabupaten Tegal
D26	=	Dummy Kabupaten Batang
D27	=	Dummy Kabupaten Pekalongan
D28	=	Dummy Kabupaten Brebes
D29	=	Dummy Kabupaten Kendal
D30	=	Dummy Kota Salatiga

D31	=	Dummy Kota Magelang
D32	=	Dummy Kota Surakarta
D33	=	Dummy Kota Pekalongan
D34	=	Dummy Kota Tegal
β_0	=	Intercept
$\beta_1 - \beta_5$	=	Koefisien regresi variabel independen
$\alpha_1 - \alpha_{34}$	=	Koefisien dummy wilayah
ε	=	error term
i	=	cross section
t	=	time series

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kondisi Kemiskinan Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi terpadat di Indonesia dengan jumlah penduduk pada tahun 2006 mencapai 33,18 juta jiwa. Sedangkan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 8.844.220 KK, dimana 2.171.201 KK diantaranya termasuk dalam kategori Rumah Tangga Miskin (RTM) (Bappeda Jateng, 2009). Pada 2006 jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah sebesar 7,10 juta jiwa atau 22,19% dari total penduduk. Dibandingkan tahun sebelumnya jumlah penduduk miskin bertambah sekitar 1,6%. Dari jumlah ini beberapa kabupaten berkontribusi besar dalam tingkat kemiskinan ini antara lain Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Brebes. Kemudian pada tahun 2007 persentase penduduk miskin di Jawa Tengah mengalami penurunan sebesar 1,76% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2008 dan 2009 persentase penduduk miskin mengalami penurunan secara bertahap sehingga berada pada tingkat 19,23% dan 17,72%. Sedangkan pada tahun 2010 persentase kemiskinan kembali turun ke tingkat 16,56% (BPS Jawa Tengah, 2010).

Penduduk daerah perdesaan lebih banyak yang dikategorikan kedalam penduduk miskin daripada penduduk di daerah perkotaan, sebagaimana yang terlihat pada Tabel 1. Pada Tabel 1 juga memperlihatkan bahwa indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan.

Tabel 1

Kemiskinan Jawa Tengah Tahun 2007-2010

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000)			% Penduduk Miskin			Garis Kemiskinan (Rp)			P1 (%)			P2 (%)		
	Kota	Desa	K+D	Kota	Desa	K+D	Kota	Desa	K+D	Kota	Desa	K+D	Kota	Desa	K+D
2010	2 258.90	3 110.20	5 369.20	14.33	18.66	16.56	205 606	179 982	192 435	2.09	2.86	2.49	0.50	0.69	0.60
2009	2 420.9	3 304.8	5 725.7	15.41	19.89	17.72	196 478	169 312	182 515	2.56	3.34	2.96	0.62	0.85	0.74
2008	2 556.5	3 633.1	6 189.6	16.34	21.96	19.23	184 704	152 531	168 168	2.97	3.78	3.39	0.82	0.98	0.90
2007	2 687.3	3 869.9	6 557.2	17.23	23.45	20.43	168 186	140 803	154 111	3.33	4.32	3.84	0.96	1.19	1.08

Sumber: BPS Jawa Tengah

Berdasarkan data PPLS 2008 dapat dilihat bahwa jumlah RTS (Rumah Tangga Sasaran) di Jawa Tengah berada pada jumlah 2.888.361 dengan beberapa kategori RTS diantaranya RTS sangat miskin sejumlah 467.726, RTS miskin sejumlah 1.147.239 dan RTS hampir miskin sejumlah 1.273.396. Jumlah RTS yang terdata di Jawa Tengah memiliki jumlah kedua terbesar se-Indonesia setelah provinsi Jawa Timur. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyaknya jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah yang perlu mendapatkan respons khusus dari pemerintah pusat dan daerah. Pada tahun 2008 jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I masih berada pada level diatas 50%. Sekitar 3,10 juta atau 33,33% dari total keluarga di Jawa Tengah masih tergolong keluarga pra sejahtera. Dengan kata lain kesejahteraan ditingkat keluarga masih tergolong kurang sejahtera (BPS Jawa Tengah, 2010).

Kesehatan Di Jawa Tengah

Pada Tabel 2 menggambarkan bahwa pelayanan kesehatan dari pemerintah ke unit terkecil wilayah administrasi pemerintahan dalam hal ini desa / kelurahan sudah menunjukkan pencapaian peningkatan cakupan wilayah. Hal ini terlihat dari persentase jumlah desa / kelurahan yang telah melaksanakan imunisasi lengkap secara gratis menunjukkan adanya tren peningkatan. Daerah yang seluruh desa / kelurahannya telah tercakup pelayanan imunisasi dasar dari pemerintah pada tahun

tahun 2007 ada 3 daerah yakni Kota Magelang, Kota Surakarta dan Kabupaten Kudus tahun 2008 ada 4 daerah yakni Kota Magelang, Kota Surakarta, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Sragen, tahun 2009 ada 6 daerah yakni Kota Surakarta, Kabupaten Sragen, Kabupaten Kudus, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Demak dan tahun 2010 ada 9 daerah yakni Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kabupaten Sragen, Kabupaten Kudus, Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Kebumen.

Pemberian pelayanan kesehatan oleh pemerintah seperti pemberian imunisasi dasar pada tingkat desa / kelurahan, sangat diperlukan untuk peningkatan kekebalan tubuh agar terhindar dari penyakit-penyakit seperti polio, campak, hepatitis B, dipteri, tetanus dll. Pemberian imunisasi diharapkan akan menurunkan angka kematian bayi dan balita di Jawa tengah.

Tabel 2
Persentase Desa/Kelurahan UCI Pada Masing-Masing Kabupaten / Kota di Jawa Tengah
Tahun 2007-2010

Kabupaten/Kota	2007	2008	2009	2010
Kab. Cilacap	70,07	92,25	91,55	92,96
Kab. Banyumas	93,96	93,05	99,40	99,09
Kab. Purbalingga	58,16	81,59	88,70	96,65
Kab. Banjarnegara	64,75	76,98	88,13	80,58
Kab. Kebumen	87,39	90,22	91,09	100,00
Kab. Purworejo	90,89	74,09	87,85	95,55
Kab. Wonosobo	75,09	57,74	87,17	93,21
Kab. Magelang	94,09	98,39	100,00	98,66
Kab. Boyolali	95,13	90,26	97,00	96,25
Kab. Klaten	95,51	91,77	97,01	98,25
Kab. Sukoharjo	97,01	97,60	91,02	98,80
Kab. Wonogiri	78,23	69,39	83,33	78,91
Kab. Karanganyar	94,35	91,53	94,35	84,18
Kab. Sragen	99,52	100,00	100,00	100,00
Kab. Grobogan	62,14	73,93	97,86	95,71
Kab. Blora	57,29	78,98	77,29	87,12
Kab. Rembang	73,81	66,33	73,81	90,82
Kab. Pati	82,02	97,78	97,78	95,32
Kab. Kudus	100,00	100,00	100,00	100,00
Kab. Jepara	94,85	95,36	95,88	94,85
Kab. Demak	96,79	99,20	100,00	100,00
Kab. Semarang	85,53	90,21	97,02	100,00
Kab. Temanggung	96,19	99,65	100,00	99,31
Kab. Kendal	65,96	80,00	98,60	97,89
Kab. Batang	94,35	95,56	88,31	92,33
Kab. Pekalongan	86,22	93,99	90,53	99,30
Kab. Pemalang	81,08	89,19	81,98	90,99
Kab. Tegal	87,11	85,71	97,21	94,43
Kab. Brebes	75,08	75,76	71,72	91,92
Kota Magelang	100,00	100,00	82,35	100,00
Kota Surakarta	100,00	100,00	100,00	98,04
Kota Salatiga	77,27	54,55	95,45	100,00
Kota Semarang	78,53	90,96	98,87	100,00
Kota Pekalongan	97,87	97,87	95,74	100,00
Kota Tegal	77,78	92,59	96,30	92,59

Sumber: BPS Jawa Tengah

Pendidikan di Jawa Tengah

Human capital merupakan investasi jangka panjang yang hasilnya baru akan dinikmati dalam tempo waktu yang cukup lama. Pendidikan merupakan *human capital investment* karena

pada dasarnya biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan dapat digolongkan sebagai investasi. Investasi tersebut akan membuahkan *gain* jika seseorang yang telah menamatkan pendidikan dapat menghasilkan pendapatan dari pekerjaan yang di gelutinya. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerja seseorang. Penggunaan persentase rasio penduduk usia 10 tahun keatas yang telah tamat pendidikan SD dan SMP dirasa cukup mewakili pendidikan itu sendiri. Dimana pada tingkat pendidikan SD dan SMP seseorang telah memiliki pengetahuan dan keahlian dasar untuk menghindarkan mereka dari keterbelakangan dan kebodohan.

Pada tahun 2007-2010 persentase penduduk berumur sepuluh tahun keatas yang menamatkan pendidikan SD dan SMP di Jawa Tengah sangat tinggi, mayoritas kabupaten/kota memiliki persentase tamat SD dan SMP lebih dari 40%. Berdasarkan Tabel 3 mengindikasikan bahwa mayoritas penduduk Jawa Tengah masih berpendidikan SD dan SMP.

Tabel 3
Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas yang Tamat SD dan SMP Menurut Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2010

Kabupaten/Kota	2007	2008	2009	2010	Rata-Rata
Kab. Cilacap	55,26	49,92	49,16	52,64	51,75
Kab. Banyumas	54,89	48,64	49,68	51,04	51,06
Kab. Purbalingga	55,92	52,44	56,75	58,54	55,91
Kab. Banjarnegara	56,69	52,27	55,24	57,64	55,46
Kab. Kebumen	56,17	50,19	58,35	59,3	56,00
Kab. Purworejo	54,64	51,06	54,04	52	52,94
Kab. Wonosobo	61,14	51,72	61,27	59,47	58,40
Kab. Magelang	53,49	50,57	51,54	54,79	52,60
Kab. Boyolali	51,11	47,03	47,32	49,57	48,76
Kab. Klaten	47,63	42,28	44,74	44,79	44,86
Kab. Sukoharjo	46,16	40,98	42,68	45,71	43,88
Kab. Wonogiri	55,69	47,56	51,63	52,12	51,75
Kab. Karanganyar	49,61	44,27	49,96	47,07	47,73
Kab. Sragen	46,77	42,03	50,19	54,67	48,42
Kab. Grobogan	58,32	56,3	61,18	63,37	59,79
Kab. Blora	49,28	46,86	51,59	49,92	49,41
Kab. Rembang	58,26	54,85	60,93	61,35	58,85
Kab. Pati	49,43	47,35	47,78	52,54	49,28
Kab. Kudus	53,42	53,09	55,49	51,81	53,45
Kab. Jepara	58,42	54,23	57,44	57,48	56,89
Kab. Demak	55,94	53,08	56,38	61,85	56,81
Kab. Semarang	50,72	48,2	51,64	50,89	50,36
Kab. Temanggung	59,48	53,44	59,74	59,93	58,15
Kab. Kendal	47,06	48,51	51,5	52,24	49,83
Kab. Batang	52,06	47,99	57,02	57,14	53,55
Kab. Pekalongan	54,79	53,73	57,17	58,8	56,12
Kab. Pemasang	52,44	49,46	55	58,76	53,92
Kab. Tegal	51	48,22	49,46	51,49	50,04
Kab. Brebes	47,85	46,89	45,94	44,85	46,38
Kota Magelang	44,89	42,29	41,63	43,52	43,08
Kota Surakarta	40,77	38,95	40,65	38,59	39,74
Kota Salatiga	40,05	41,73	40,76	41,15	40,92
Kota Semarang	38,44	39,13	43,04	37,7	39,58
Kota Pekalongan	48,92	50,8	56,2	50,59	51,63
Kota Tegal	48,97	49,48	50,1	48,85	49,35

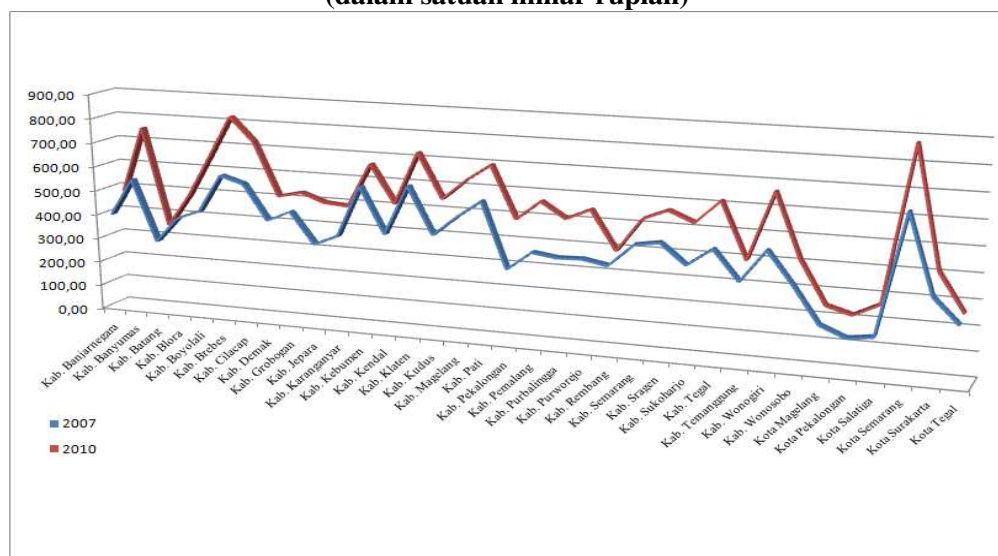
Sumber: BPS Jawa Tengah

Rata-rata persentase penduduk yang menamatkan SD dan SMP dengan persentase tinggi terdapat di Kabupaten Grobogan dengan persentase 59,79%, Kabupaten Rembang dengan persentase 58,85%, Kabupaten Wonosobo dengan persentase 58,40%, Kabupaten Temanggung dengan persentase 58,15%. Sedangkan daerah yang rata-rata persentase tamat SD dan SMP rendah berada di Kota Semarang dengan persentase 39,58%, Kota Surakarta dengan persentase 39,74%, Kota Salatiga dengan persentase 40,92%, dan Kota Magelang dengan persentase sebesar 43,08%. Pada daerah perkotaan tingkat pendidikan penduduknya cenderung lebih tinggi sehingga pada persentase tamat SD dan SMP terhitung kecil persentasenya.

Pengeluaran Pemerintah di Jawa Tengah

Pada Gambar 1 dapat dilihat bahwa pada rentang waktu 2007-2010 pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Kenaikan alokasi pengeluaran pemerintah

Gambar 1
Pengeluaran Pemerintah pada Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2010
(dalam satuan miliar rupiah)



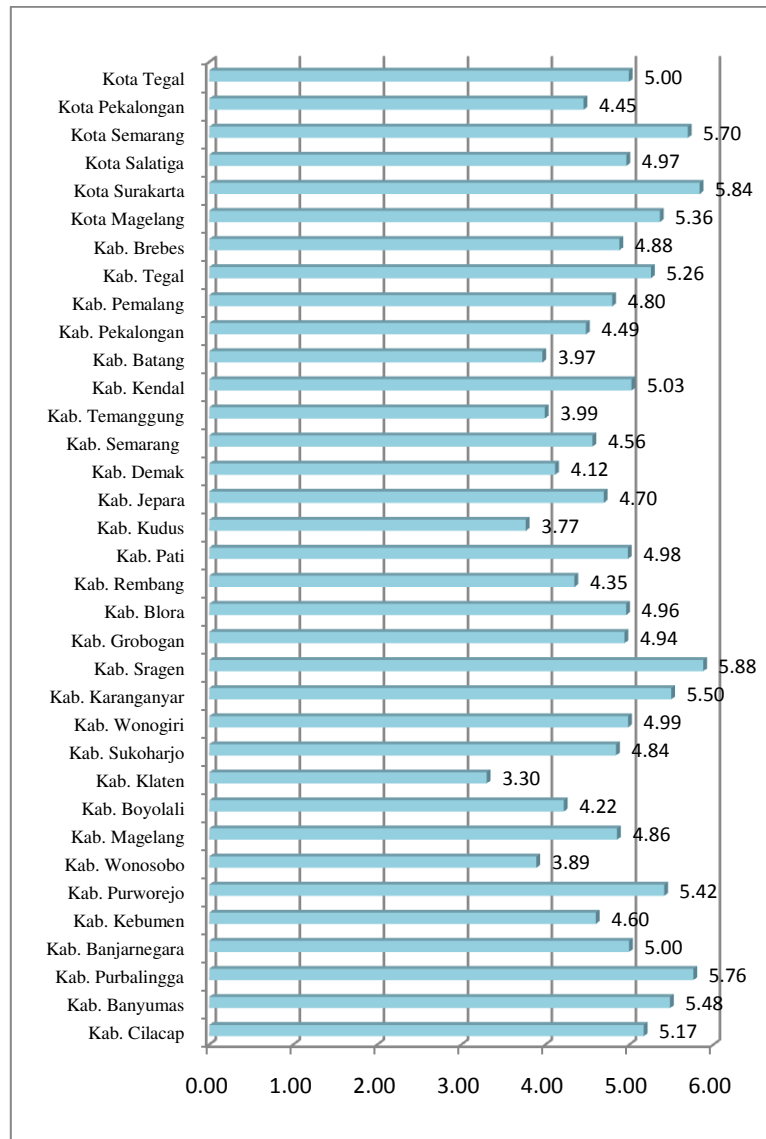
Sumber: DJPK (Direktorat Jendral Perimbangan dan Keuangan)

tersebut terjadi pada seluruh kabupaten / kota di Jawa Tengah. Kenaikan alokasi pengeluaran pemerintah menggambarkan kenaikan investasi sumberdaya yang dilakukan pemerintah khususnya pada bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, perumahan dan fasilitas umum. Kota Semarang merupakan daerah dengan jumlah pengeluaran pemerintah bidang perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, perumahan dan fasilitas umum tertinggi dengan total nilai mencapai 876 miliar rupiah, disusul Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas dengan total nilai 818 miliar rupiah dan 750 miliar rupiah. Sedangkan alokasi pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, perumahan dan fasilitas umum yang nilainya rendah terdapat di daerah Kota Pekalongan dengan nilai 212 miliar rupiah.

4.1.6 Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah

Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Gambar 2 bahwa Provinsi Jawa Tengah mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, artinya setiap tahunnya terjadi peningkatan PDRB pada masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah. Laju pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan adanya peningkatan kapasitas dalam perekonomian dari tahun ke tahun. Daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Kabupaten Sragen dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,88%. Daerah lainnya yang memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi tinggi adalah Kota Surakarta dengan 5,84%, Kabupaten Purbalingga dengan 5,76% dan Kota Semarang 5,70%. Sedangkan daerah yang memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi paling rendah adalah Kabupaten Klaten 3,30%.

Gambar 2
Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten / Kota di Jawa Tengah Tahun 2007-2010



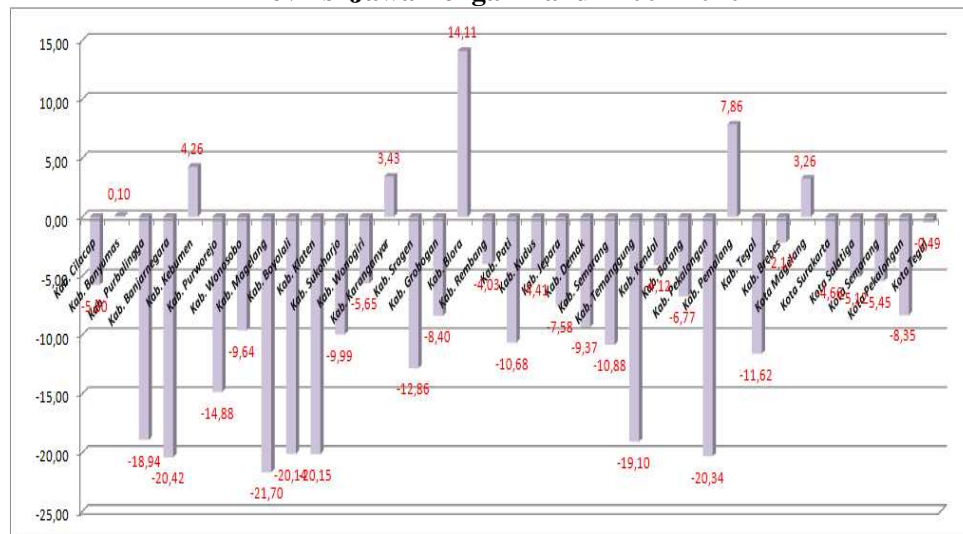
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

4.1.7 Pengangguran di Jawa Tengah

Naik turunnya jumlah pengangguran salah satunya dapat disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduk. Pada laju pertumbuhan penduduk yang tinggi akan meningkatkan jumlah penduduk usia kerja yang kemudian tanpa didukung oleh adanya lapangan pekerjaan yang cukup di pasar kerja menyebabkan terjadinya lonjakan jumlah pengangguran.

Dalam Gambar 4.3 diketahui hanya terdapat beberapa kabupaten / kota yang mempunyai nilai rata-rata laju pertumbuhan pengangguran yang nilainya negatif. Arti dari nilai negatif tersebut adalah pertumbuhan pengangguran di kabupaten /kota tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, kemudian dari hasil pertumbuhan tersebut dirata-rata dalam kurun waktu beberapa tahun. Kabupaten / kota dengan rata-rata pertumbuhan pengangguran yang negatif terdapat pada Kota Pekalongan (-7,761%), Kabupaten Banjarnegara (-4,976%), Kabupaten Pekalongan (-4,243%), Kabupaten Wonogiri (-3,908%), Kabupaten Magelang (-1,996%), dan Kabupaten Demak (-0,239%). Sedangkan untuk kabupaten / kota dengan jumlah pengangguran tiga terbanyak pada tahun 2009 terdapat di Kabupaten Cilacap dengan 89.175 jiwa, Kota Semarang dengan 83.963 jiwa dan Kabupaten Pemalang dengan 79.372 jiwa.

Gambar 3
Rata-Rata Laju Pertumbuhan Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2010



Sumber: BPS Jawa Tengah

Pembahasan Hasil Penelitian

Setelah melakukan regresi didapat nilai R^2 Adjusted sebesar 0,942817. Penggunaan R^2 Adjusted dipilih karena nilai R^2 -nya yang sudah disesuaikan/dikoreksi dengan banyaknya df (*degree of freedom*) sehingga lebih baik untuk mengetahui kesesuaian model. Pada penelitian ini menggunakan data panel sehingga df-nya menjadi besar, oleh karena itu digunakanlah R^2 Adjusted. Hasil nilai R^2 Adjusted tersebut memiliki arti bahwa variabel kesehatan, pendidikan, pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi, pengangguran mampu menjelaskan variasi tingkat kemiskinan sebesar 94,28%. Sedangkan sisanya sebesar 5,72 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang digunakan dalam penelitian. Sedangkan untuk uji F diperoleh nilai F-statistik sebesar 59,76361, jika dibandingkan F-tabel sebesar 1,50 maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen karena nilai F statistik > F-tabel.

Tabel 4
Hasil Uji R^2 dan Uji F

R-squared	0.958861
Adjusted R-squared	0.942817
F-statistic	59.76361
Prob(F-statistic)	0.000000*

* signifikan 5%

Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Tabel 5 bahwa variabel kesehatan memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Arti tanda negatif dalam koefisien variabel kesehatan adalah ketika variabel kesehatan mengalami kenaikan menyebabkan tingkat kemiskinan mengalami penurunan. Hasil ini sesuai dengan pendapat Lincoln (1999) yang menjelaskan intervensi untuk memperbaiki kesehatan dari pemerintah juga merupakan suatu alat kebijakan penting untuk mengurangi kemiskinan. Bentuk pelayanan kesehatan dari pemerintah seperti pelaksanaan imunisasi dasar pada tingkat kelurahan/desa sangat penting untuk peningkatan kesehatan masyarakat. Peningkatan kesehatan akan berdampak pada peningkatan produktivitas seseorang dan peningkatan harapan hidup seseorang. Ketika seseorang memiliki sistem imun tubuh yang kuat maka tingkat morbiditas akan menurun karena seseorang telah memiliki imunitas dan menjauhkannya dari serangan penyakit tertentu. Hal ini berarti biaya kesehatan rumah tangga bisa berkurang dan dengan berkurangnya pengeluaran untuk biaya kesehatan rumah tangga maka

alokasi tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok lainnya guna meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Hasil regresi variabel pendidikan menunjukkan pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2008), Wongdesmiwati (2009), yang serta penelitian Rasidin K. Sitepu dan Bonar M. Sinaga (2005). Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa dengan pendidikan dasar SD dan SMP seseorang sudah memiliki ilmu pengetahuan dan keahlian dasar yang dapat digunakan untuk menjauhkan dirinya dari keterbelakangan dan kebodohan. Seseorang yang terbelakang sangat erat kaitannya dengan kemiskinan karena orang tersebut tidak mempunyai pengetahuan yang dapat digunakan untuk menjalani kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hasil regresi menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan temuan Rashid Mehmood dan Sara Sadiq (2010) yang mengemukakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kemiskinan memiliki hubungan negatif jika pengeluaran tersebut adalah jalur pembangunan seperti pembangunan fasilitas sosial, barang publik, infrastruktur, biaya modal tambahan, kesehatan dan pendidikan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan beberapa penelitian mengenai pengeluaran pemerintah dan kemiskinan seperti: Fan, Hazell, dan Thorat (2000) dan Fan, Zhang, Rao (2004). Pengeluaran pemerintah khususnya pada bidang-bidang kesehatan, pendidikan, fasilitas umum dan perlindungan sosial sangat membantu masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraannya. Karena seperti yang kita ketahui pengeluaran pemerintah pada bidang-bidang tersebut banyak yang dialokasikan sebagai sumber pendanaan program-program pengentasan kemiskinan yang berbentuk pelayanan kepada masyarakat miskin.

Tabel 5
Hasil Uji t

Variabel	Prob.
H	0.0141*
E	0.0118*
GE	0.0000*
G	0.2660
U	0.0008*

* signifikan 5%

Berdasarkan hasil regresi bahwa variabel pertumbuhan ekonomi menunjukkan tanda negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Hasil penelitian ini berbeda dengan teori dan penelitian terdahulu yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini. Yang mana menurut Kuznet dalam Tambunan (2001), pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang. Selanjutnya menurut Hermanto S. dan Dwi W. (2008) dan Wongdesmiwati (2009) mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi tingkat kemiskinan yang akan ada. Semakin impresif pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada mereduksinya tingkat kemiskinan yang ada atau dapat dikatakan terdapat hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat kemiskinan. Tidak signifikannya pertumbuhan ekonomi secara statistik dalam mempengaruhi kemiskinan dapat dilihat berdasarkan data bahwa laju pertumbuhan ekonomi pada masing-masing kabupaten / kota di Jawa Tengah tahun 2007 hingga tahun 2010 tidak selalu meningkat atau dengan kata lain selisih tingkat pertumbuhan ekonomi tahun sekarang dengan tahun sebelumnya mengalami naik-turun (fluktuatif). Padahal tingkat kemiskinan di masing-masing kabupaten / kota pada tahun 2007-2010 tingkatnya cenderung menurun di setiap tahunnya. Hal ini mungkin saja yang menyebabkan ketidaksignifikan variabel pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan. Kemungkinan lain secara riil disebabkan karena PDRB Jawa Tengah tertinggi adalah pada sektor industri yang setiap tahun meningkat dari tahun 2008 sebesar 55.348.962,88 miliar rupiah dan menjadi 61.390.101,24 miliar rupiah pada tahun 2010 dengan share sebesar > 30% terhadap PDRB Jawa Tengah. Para pekerja sektor industri dituntut untuk memiliki kualifikasi pendidikan yang tinggi,

sedangkan rata-rata penduduk Jawa Tengah hampir sekitar 80% hanya berpendidikan tamat SMP kebawah. Hal ini kemungkinan yang menyebabkan tidak signifikannya pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah karena Jawa Tengah mengalami pertumbuhan ekonomi tetapi banyak tenaga kerja (khususnya penduduk miskin) yang tidak terserap karena tidak sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan perusahaan khususnya pada sektor industri. Temuan serupa juga pernah dilakukan oleh World Bank (1990) dan Ravallion (1995) menunjukkan tidak ada korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan.

Pengangguran memberikan pengaruh yang positif terhadap tingkat kemiskinan 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah terlihat dari Tabel 5 yang menunjukkan variabel pengangguran signifikan pada taraf signifikansi 5%. Pengaruh tanda positif pada pengangguran memiliki arti semakin tinggi jumlah pengangguran akan mengakibatkan peningkatan tingkat kemiskinan, hasil ini sesuai dengan pendapat Sadono Sukirno (2004) yang menyatakan bahwa dampak buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang mereka capai. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Dian Octaviani yang mendapatkan hasil bahwa pengangguran memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Jika dikaitkan dengan pendapat nurse pada teori lingkaran setan kemiskinan yang menggambarkan rendahnya produktivitas sebagai salah satu sebab kemiskinan, penelitian ini memiliki hasil yang sejalan. Pengangguran bisa diartikan sebagai tingkat produktivitas seseorang yang rendah atau bisa juga tidak melakukan produktivitas sama sekali. Hal ini karena penganggur tidak memiliki suatu pekerjaan untuk menghasilkan upah ataupun gaji. Padahal sebagian besar rumah tangga bergantung dari gaji / upah yang didapat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Dalam menginterpretasikan hasil regresi data panel dengan menggunakan metode *LSDV* yang menggunakan variabel *dummy*. Signifikannya variabel *dummy* yang digunakan menunjukkan bahwa kondisi tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Jawa Tengah tersebut tidak sama (berbeda) dengan perkembangan tingkat kemiskinan Kota Semarang yang dijadikan sebagai *benchmark*. Kota Semarang dijadikan *benchmark* karena tingkat kemiskinannya paling rendah dibandingkan kabupaten / kota lain di Jawa Tengah.

Tabel 6
Dummy Effect

Kabupaten/Kota	Dummy Effect	Kabupaten/Kota	Dummy Effect
Kota Semarang	20,69	Kabupaten Pati	34,49
Kabupaten Cilacap	35,3	Kabupaten Klaten	38,19
Kabupaten Banyumas	39,07	Kabupaten Pemalang	36,04
Kabupaten Purbalingga	44,42	Kabupaten Demak	38,19
Kabupaten Banjarnegara	40,09	Kabupaten Semarang	27,36
Kabupaten Sragen	38,17	Kabupaten Rembang	43,6
Kabupaten Purworejo	36,37	Kabupaten Jepara	27,96
Kabupaten Wonosobo	44,02	Kabupaten Tegal	30,72
Kabupaten Magelang	34,46	Kabupaten Batang	32,89
Kabupaten Boyolali	33,62	Kabupaten Pekalongan	35,5
Kabupaten Kebumen	45,17	Kabupaten Brebes	40,11
Kabupaten Sukoharjo	27,49	Kabupaten Kendal	33,8
Kabupaten Wonogiri	37,89	Kota Salatiga	21,96
Kabupaten Karanganyar	31,69	Kota Magelang	25,26
Kabupaten Kudus	28,26	Kota Surakarta	30,1
Kabupaten Grobogan	37,57	Kota Pekalongan	23,5
Kabupaten Blora	35,09	Kota Tegal	24,93
Kabupaten Temanggung	32,53		

Sementara angka positif atau negatif pada koefisien dummy menunjukkan bahwa kabupaten / kota yang dinyatakan dengan variabel dummy tersebut memiliki kondisi tingkat kemiskinan yang lebih rendah (untuk tanda negatif) atau lebih tinggi (untuk tanda positif) dibandingkan Kota Semarang yang dijadikan *benchmark*. Dari Tabel 6 diketahui bahwa selama 4 tahun periode penelitian terdapat 34 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang memiliki kondisi kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Kota Semarang. Hal ini

berarti semua kabupaten/kota di Jawa Tengah memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan Kota Semarang.

Kota Semarang layak dijadikan percontohan bagi daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah karena tingkat kemiskinan di Kota Semarang hanya berkisar 5% dan yang paling rendah se-Jawa Tengah. Kota Semarang juga merupakan daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi di Jawa Tengah dengan skor 76,90. Inovasi Pemerintah Kota Semarang dalam hal pengentasan kemiskinan dituangkan dalam program pengentasan kemiskinan bernama Gerdu Kempling (Gerakan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan, Infrastruktur, Lingkungan). Program Gerdu Kempling mempunyai maksud menurunkan angka kemiskinan di 177 kelurahan dengan target penurunan 2% per tahun. Diharapkan pemerintah kabupaten/kota lainnya di Jawa Tengah termotivasi untuk melakukan inovasi guna program pengentasan kemiskinan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, didapat bahwa variabel kesehatan, pendidikan dan pengeluaran pemerintah signifikan dan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Hal ini berarti setiap peningkatan pada variabel pendidikan, kesehatan dan pengeluaran pemerintah akan menyebabkan tingkat kemiskinan turun. Sedangkan untuk variabel pengangguran signifikan dan berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan, artinya ketika jumlah pengangguran meningkat maka tingkat kemiskinan akan juga meningkat. Namun untuk variabel pertumbuhan ekonomi tidak signifikan secara statistik mempengaruhi tingkat kemiskinan.

Keterbatasan pada penelitian adalah data *time series* yang digunakan rentang waktunya tidak cukup lama sehingga variasi yang dihasilkan masih kurang tinggi sehingga mempengaruhi hasil signifikansi variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Kemudian pada saat tahun penelitian ada beberapa data yang masih bersifat sementara yang digunakan dalam penelitian ini seperti data pertumbuhan ekonomi.

Sebagai saran untuk penelitian selanjutnya agar dapat menggunakan data *time series* yang lebih panjang agar variasi yang didapat semakin banyak. Kemudian disarankan untuk menggunakan tahun dengan data yang sudah bersifat tetap, menghindari data yang masih bersifat sementara.

REFERENSI

- Arsyad, Lincolin. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Keempat. STIE YKPN. Yogyakarta.
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Jawa Tengah. 2009. *Dukungan Provinsi Jawa Tengah Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan*. Bappeda Jateng
- Badan Pusat Statistik. Berbagai Tahun Terbitan. *Jawa Tengah Dalam Angka*. Semarang: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah
- Badan Pusat Statistik. 2008. *Data dan Informasi Kemiskinan 2008*. Semarang: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. 2010. *Berita Resmi Statistik Jawa Tengah 2010*. Semarang: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah
- Badan Pusat Statistik. Berbagai Tahun Terbitan. *Survey Sosial Ekonomi Nasional Jawa Tengah*. Semarang: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah
- Badan Pusat Statistik. Berbagai Tahun Terbitan. *Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Tengah*. Semarang: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah

- Dinas Kesehatan Jawa Tengah. Berbagai Tahun Terbitan. *Profil Kesehatan Jawa Tengah*. Semarang: Dinas Kesehatan Jawa Tengah
- Fan, Shenggen, Xiaobo Zhang, and Neetha Rao. 2004. *Public Expenditure, Growth, And Poverty Reduction In Rural Uganda*. DSGD Discussion Paper No. 4. Washington DC: International Food Policy Research Institute
- Fan, Shenggen, P. Hazell, and S. Thorat. 2000. *Government spending, agricultural growth, and poverty in rural India*. *American Journal of Agricultural Economics* 82 (4): 1038- 1051.
- Gujarati, Damodar N. 2009. *Basic Econometrics*. Fifth Edition. New York: The McGraw Hill Companies Inc
- Kuncoro, Mudrajad. 2006. *Ekonomika Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Edisi Keempat. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Mankiew, Gregory. 2000. *Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Mehmood, Rashid and Sara Sadiq. 2010. *The Relationship between Government Expenditure and Poverty: A Cointegration Analysis*. Vol. 1, Issue 1, Pages 29-37
- Octaviani, Dian. 2001. *Inflasi, Pengangguran, dan Kemiskinan di Indonesia: Analisis Indeks Forrester Greer & Horbecke*. Media Ekonomi, H. 100-118, Vol. 7, No. 8.
- Ravallion, M. 1995. *Growth and Poverty: evidence for developing countries in the 1980s*. Economics letters, Vol.48, h. 411-417
- Saleh, Samsubar. 2002. *Faktor-Faktor Penentu Tingkat Kemiskinan Regional Di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, h. 87-102, vol.7, No.2
- Siregar, Hermanto dan Dwi W. 2006. *Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Penduduk Miskin di Indonesia : Proses Pemerataan dan Pemiskinan*. Direktur Kajian Ekonomi: Institusi Pertanian Bogor
- Sitepu, Rasidin dan Bonar Sinaga. 2009. *Dampak Infestasi Sumberdaya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia*. Prisma, H 17 - 31, No. 1.
- Sukirno, Sadono. 2004. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Edisi Ketiga. Jakarta: Grafindo Persada
- Tambunan, Tulus. 2001. *Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris*. Jakarta: Ghalia
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi Kesembilan. Jakarta: Erlangga
- Wongdesmiwati, 2009. *Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia: Analisis Ekonometrika*.
<http://wongdesmiwati.files.wordpress.com/2009/10/pertumbuhan-ekonomi-dan-pengentasan-kemiskinan-di-indonesia-analisis-ekonometri.pdf>
- World Bank. 1990. *World development report: Poverty*. New York: Oxford University Press.
- www.djpk.depkeu.go.id